



Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Aplikasi Perkantoran Secara Elektronik (E-Office) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Habib Caesar Artanugraha¹, Geovani Meiwanda²

^{1,2}Universitas Riau

Abstract

Received: 10 April 2023

Revised: 23 April 2023

Accepted: 11 Mei 2023

The Riau Province Manpower and Transmigration Office made one of the changes, namely by improving office administration processes by utilizing information and communication technology by implementing an electronic office or e-Office. E-Office is a service that aims to simplify the process of office administration activities that are carried out electronically. In addition to minimizing the use of paper, e-office is also useful for facilitating data storage and data processing in the office, and of course, e-office can be accessed anywhere and anytime. The purpose of this study was to determine the implementation of Riau governor regulation number 56 of 2016 regarding guidelines for managing office applications electronically (e-office) in the Department of Manpower and Transmigration of Riau Province. The type of research used is qualitative research and data collection techniques based on interviews and documentation. This study uses Charles O. Jones's Theory which uses 3 indicators, namely Organization, Interpretation, and Application. The results of this study are that there are still several obstacles that occur in its implementation, so the use of e-office is still not optimal at the Manpower and Transmigration Office of Riau Province where there is still low employee initiative in using e-office because employees are still comfortable in manual work culture, then the signature of the head of a service which is still not able to be used electronically also causes the Riau Province Manpower and Transmigration Service to be unable to send outgoing letters via e-office, furthermore, the office administration has not been fully backed up at the Office of Manpower and Riau Province's transmigrasi into e-office applications has resulted in the implementation of e-office not running optimally. So these various factors and needs must be corrected and implemented to achieve an optimal and maximal application.

Keywords: Implementation, Application, E-Office

(*) Corresponding Author: habib.caesar1920@student.unri.ac.id

How to Cite: Artanugraha, H., & Meiwanda, G. (2023). Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Aplikasi Perkantoran Secara Elektronik (E-Office) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 171-178. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8069928>

PENDAHULUAN

Era globalisasi telah mempunyai dampak yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya termasuk aspek hukum. Sebagaimana negara-negara berkembang lain di dunia, Indonesia juga tidak mampu menutup diri dari perkembangan yang terjadi. Perbaikan kinerja aparat pelayanan publik merupakan suatu keharusan jika dikaitkan dengan perkembangan dan tuntutan kontemporer seperti globalisasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

merupakan salah satu jawaban atas tuntutan arus global. Undang-Undang ini mendorong terciptanya good governance.

Menurut Inpres Nomor 3 Tahun 2003, dikatakan bahwa pengembangan E-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan E-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebijakan birokrasi di Indonesia, yang mewajibkan setiap kegiatan perkantoran atau proses bisnis yang berlangsung harus berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga menyebabkan terjadinya perpindahan proses kegiatan kantor yang awalnya menggunakan sistem konvensional ke sistem baru yaitu sistem otomatisasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mensosialisasikan e-government di lingkungan perkantoran yaitu dengan cara penerapan E-Office (Dewandaru, 2013).

Pemerintah Provinsi Riau tampak serius dalam hal mewujudkan pengembangan e-government di lingkungan perkantoran OPD Povinsi Riau sekaligus memperkuat penerapan aplikasi E-Office. Hal itu tampak dari dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aplikasi Perkantoran secara Elektronik (E-Office) di lingkungan Provinsi Riau, bisa dilihat pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau harus menggunakan aplikasi perkantoran secara elektronik (E-Office) dalam penyelenggaraan administrasi perkantoran”.

E-Office itu sendiri merupakan sistem teknologi informasi yang bertujuan untuk menyederhanakan proses kegiatan perkantoran terutama dalam hal korespondensi kedinasan. Sebagai salah satu hasil perkembangan E-Office tentunya akan membantu pegawai, baik di kantor, organisasi pemerintah, maupun swasta dan perusahaan-perusahaan dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan baik dan tepat waktu. Sistem E-Office sendiri selain untuk meminimalisasi penggunaan kertas, E-Office juga bermanfaat untuk mempermudah penyimpanan data dan pengolahan data di dalam suatu kantor karena data tersebut menjadi terpusat (centralized) dengan bantuan data base, sehingga data yang sudah disimpan akan saling terhubung dan menjadi satu sehingga dapat memberikan informasi bagi kantor tersebut. Selain data, tentunya penggunaan komputer bagi para pegawai juga sepenuhnya dibutuhkan demi terciptanya sistem E-Office.

Hal ini menjelaskan bahwa dalam E-Office semua semua pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi perkantoran dikerjakan secara elektronik dengan menggunakan bantuan alat komunikasi dan sistem informasi E-Office menggantikan proses administrasi berbasis manual (paper-based) ke proses berbasis elektronik (paperless) dengan memanfaatkan fasilitas jaringan lokal (LAN) maupun jaringan internet (online).

Penerapan aplikasi E-Office tentu membawa positif terhadap kinerja pegawai instansi terkait khususnya pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Melalui aplikasi ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam administrasi perkantoran, yaitu:

1. Melalui E-Office semua surat yang dibuat, dikirim kan ataupun diterima terekam dengan baik dalam jaringan internet sehingga akan lebih mudah mencari surat yang di inginkan dalam waktu-waktu tertentu.
2. E-Office juga menghambat penggunaan sumber daya, seperti waktu dan biaya karena surat tersebut disimpan dan dibuat kedalam elektronik.
3. Melalui E-Office, dapat mempermudah sarana dan prasarana surat menyurat dari yang sebelumnya 2-4 hari akan tetapi setelah menggunakan E-Office bisa 15-30 menit selesai.

Dapat dilihat bahwa banyak kemudahan yang diberikan oleh E-office guna menunjang proses kerja administrasi perkantoran sesuai dengan Peraturan Gubernur No 56 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2 poin a yang mana E-Office menciptakan koordinasi baik antar OPD di lingkungan Provinsi Riau maupun antar pegawai, serta mewujudkan integrasi antara Gubernur dan juga OPD yang berada di Provinsi Riau guna mewujudkan peraturan Gubernur No 56 Tahun 2016, dan E-Office juga menyinkronisasikan serta emberikan kelancaran komunikasi kedinasan secara elektronik antar satuan kerja perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi dan administrasi pemerintahan, dan juga menurut admin aplikasi e-office Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau penggunaan E-Office tergolong mudah hanya saja pegawai yang masi belum terbiasa dalam melaksanakan budaya kerja berbasis elektronik, seperti ketika pegawai sedang berada diluar kantor, masih jarang nya pegawai mengakses aplikasi e-office, padahal e-office sendiri dapat di akses melalui smartphone sehingga pegawai dapat menjalan e-office dimanapun dan kapanpun. Namun karena masih nyamannya pegawai dengan budaya kerja secara manual, menjadikan hal tersebut sebagai salah satu penghambat dalam hal implementasi e- office di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

Adapun fitur-fitur administrasi perkantoran yang menggunakan aplikasi E-Office antara lain:

Tabel 1.
Administrasi Perkantoran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

NO	Administrasi Perkantoran yang Menggunakan <i>E-Office</i>	
1	E- Surat	<input type="checkbox"/>
2	E- SPT	<input type="checkbox"/>
3	E-Izin	<input type="checkbox"/>
4	E-Agenda	<input type="checkbox"/>
5	E-Absen	<input type="checkbox"/>
6	E-Cuti	-
7	E-SPJ	-

Dapat dilihat dari tabel diatas, fitur yang ada di *E-Office* ada 7 fitur. Namun, hingga saat ini fitur yang bisa digunakan masih 5 fitur, yaitu E-Surat, E- SPT, E AGENDA, dan E-Absen,dan E-Izizn. Karena, untuk fitur E-Cuti, dan E- SPJ masih dalam tahap penyempurnaan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Provinsi Riau.

Salah satu OPD yang telah menggunakan *e-office* ialah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, yang mana telah menggunakan *e-office* sejak tahun 2018, adapun administrasi perkantoran yang digunakan dalam implementasi *e-office* pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau sebagai berikut:

Tabel 2.
Administrasi Perkantoran Pada Dinas Tenagakerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau

NO	Administrasi Perkantoraan	Surat manual	Secara Elektronik (<i>E-Office</i>)
1	Keputusan Kepala SKD		-
2	Surat Edaran	<input type="checkbox"/>	-
3	Surat Biasa	<input type="checkbox"/>	-
4	Surat Keterangan	<input type="checkbox"/>	-
5	Surat Izin	-	<input type="checkbox"/>
6	Surat Perjanjian	<input type="checkbox"/>	-
7	Surat Perintah Tugas (SPT)	-	<input type="checkbox"/>
8	Surat Perintah Perjalanan Dinas	<input type="checkbox"/>	-
9	Surat Undangan	<input type="checkbox"/>	-
10	Nota Dinas	<input type="checkbox"/>	-
11	Surat Perintah	<input type="checkbox"/>	-
12	Pengumuman	<input type="checkbox"/>	-
13	Berita Acara	<input type="checkbox"/>	-
14	Surat Masuk	-	<input type="checkbox"/>
15	Surat keluar	-	<input type="checkbox"/>
16	Agenda	-	<input type="checkbox"/>
17	Absen	-	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau memiliki banyak jenis administrasi perkantoran namun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau hanya menggunakan fitur surat izin, surat masuk, Surat keluar, Agenda, Absen serta Surat Perintah Tugas (SPT). Khusus penggunaan SPT hanya diperuntukkan bagi kegiatan atau aktivitas perkantoran yang dilaksanakan di dalam kota dan tidak mengeluarkan anggaran perjalanan, namun untuk kegiatan yang bersifat luar kota dan membutuhkan anggaran masih menggunakan cara manual, sedangkan untuk fitur administrasi yang lainnya masih menggunakan cara manual dimana seharusnya penggunaan *E-Office* sangatlah mempermudah pekerjaan administrasi perkantoran di lingkungan OPD Provinsi Riau termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aplikasi Perkantoran secara Elektronik (*E-Office*) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau”.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menentukan hasil penelitian ini seperti mencari data, mengumpulkan data, mengolah data maupun menganalisis data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aplikasi Perkantoran secara Elektronik (*E- Office*) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Penelitian ini membahas tentang Implementasi/pelaksanaan aplikasi *e-office* di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, dalam hal ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones dalam Kadji (2015:73). Teori ini mengemukakan mengenai hal yang paling penting dalam implementasi kebijakan / program menyangkut tiga aktivitas yaitu:

1. Organisasi
2. Interpretasi
3. Aplikasi

Untuk dapat membahas mengenai tiga hal paling penting tersebut dalam Implementasi Peraturan Gubernur Riau no.56 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aplikasi Perkantoran secara Elektronik (E-Office) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, peneliti menggali informasi dengan menggunakan Teknik wawancara kepada informan yang terkait dengan penelitian ini, berikut merupakan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang diperlukan mengenai Implementasi Peraturan Gubernur Riau no.56 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aplikasi Perkantoran secara Elektronik (E-Office) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau:

1. Organisasi

Organisasi dalam konteks implementasi adalah aktivitas yang paling utama yang akan membentuk unit-unit, metode yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau telah menjalankan aplikasi *e-office* sejak tahun 2018 hanya saja masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya hingga saat ini yang menyebabkan pelaksanaan Implementasi Peraturan Gubernur Riau no.56 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aplikasi Perkantoran secara Elektronik (E-Office) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau masih belum optimal, salah satu faktor yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan implementasi Peraturan Gubernur Riau No.56 tahun 2016 ialah faktor Sumber Daya yang masih belum dapat memahami sepenuhnya tentang pelaksanaan *e-office*.

Pelaksanaan aplikasi dari para implementor sudah cukup berperan aktif dan sudah melakukan tugasnya sesuai bidang masing-masing serta anggaran yang sudah disediakan walaupun terbatas, dan juga sarana dan prasarana yang cukup memadai, tetapi tentu ada beberapa permasalahan dan hambatan yang terjadi saat pelaksanaan aplikasi *e-office* di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau ini.

2. Interpretasi

Interpretasi merupakan penafsiran oleh para implementor agar kebijakan menjadi jelas dan dapat diterima serta dapat dilaksanakan. Interpretasi memuat

Dalam menjalankan proses pelaksanaan kebijakan maka harus ada mekanisme pelaksanaan kebijakan yang lebih jelas dan terarah. Mekanisme ini biasanya ditetapkan melalui *Standard Operating Procedure* (SOP). SOP atau yang disebut juga prosedur kerja ini menjadi pedoman para pelaksana dalam bertindak agar mencapai tujuan yang diinginkan. Jika hal tersebut tidak sesuai dengan SOP maka tentu ada sanksi yang diberikan kepada orang yang tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan.

Dalam implementasi aplikasi *e-office* di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, pedoman kerja para pelaksana/implementor yaitu Peraturan Gubernur Riau no.56 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan *e-office*. Dan pada pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa Peraturan Gubernur Riau ini sebagai acuan dalam pelaksanaan tata naskah dinas elektronik pada setiap satuan kerja perangkat daerah agar terwujudnya persamaan pemahaman tentang penyelenggaraan tata naskah dinas elektronik pada *e-office*.

Jika dilihat dari sikap dan tanggung jawab implementor dalam memahami dan menjalankan program sudah sangat baik karena implementor sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penggunaan aplikasi *e-office*, walaupun masih terjadi beberapa hambatan yaitu dari masih adanya pegawai yang masih nyaman dengan budaya kerja secara manual.

3. Aplikasi

Aplikasi merupakan penerapan secara rutin dari segala keputusan dan aturan dengan melakukan segala aktivitas agar tercapai tujuan dari kebijakan awal. Pengaplikasian program ini sudah berjalan cukup baik walaupun sulit beradaptasi di lingkungan pegawai yang masih nyaman dengan budaya kerja secara manual, dan aplikasi *e-office* ini terbukti memudahkan proses kerja pegawai walaupun tentu terdapat beberapa hambatan saat melaksanakannya. Dan untuk pegawai belum sepenuhnya menggunakan aplikasi secara penuh, karena masih terdapat pegawai yang masih memilih secara manual yang disebabkan ada pegawai yang kurang paham dengan cara penggunaan komputer dan internet sehingga pegawai merasa kesulitan.

Hambatan yang terjadi saat implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aplikasi Perkantoran secara Elektronik (E-Office) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Dalam proses implementasi aplikasi *e-office* di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau terdapat beberapa hambatan yang terjadi sehingga mengakibatkan pelaksanaan program berjalan kurang efektif. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi saat implementasi aplikasi *e-office* di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau setelah dirangkum menjadi beberapa poin, yaitu:

1. Rendahnya Inisiatif Sumber Daya Manusi Dalam Penggunaan Aplikasi E-Office

Aplikasi *e-office* tidak dapat berjalan secara optimal dikarenakan masih nyamannya pimpinan dan pegawai dalam budaya kerja secara manual, yang mana ketika pimpinan dan pegawai tidak berada di kantor dan tidak di jam kantor, mereka jarang untuk mengecek *e-office*, padahal dengan adanya *e-office* pekerjaan dapat dilaksanakan kapanpun dan dimanapun.

Pegawai juga masih kurang rasa tanggung jawab serta kurang paham tentang

pentingnya penggunaan *e-office* sehingga mengharuskan admin untuk selalu melakukan pengawasan. pemahaman pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau masih tergolong minim sehingga hal tersebut menyebabkan inisiatif mereka kurang untuk mengecek *e-office* secara berkala yang menyebabkan proses kerja yang seharusnya dapat berlangsung singkat, malah tetap saja menjadi lambat.

2. Tanda Tangan Kepala Dinas Yang Belum Bisa Digunakan Secara Elektronik

Aplikasi *e-office* ini sangat bergantung dengan tanda tangan elektronik, sehingga jika tidak ada tanda tangan elektronik dalam bentuk *barcode* maka pengesahan untuk surat yang akan di sahkan tidak dapat di akses melalui *e-office*. Sehingga hal tersebut mempengaruhi penggunaan *e-office* di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

Dalam hal penggunaan tanda tangan elektronik sangat berpengaruh dalam proses penggunaan bagian surat keluar, akan tetapi untuk proses administrasi perkantoran lainnya yang berkaitan dengan fitur *e-office* tidak berpengaruh dikarenakan guna tanda tangan elektronik itu sendiri hanya sebagai pengesahan surat yang akan ditujukan untuk instansi lain diluar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

3. Belum Terback-up nya Administrasi Perkantoran Yang ada Kedalam Fitur E-Office

Dari 17 jenis administrasi perkantoran yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, yang dapat di jalankan sesuai fitur yang ada hanya 6 saja, hal ini tentunya menjadisuatu kendala mengenai konsistensi pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau No.56 Tahun 2016 yang menyebabkan bahwa aplikasi *e-office* ini masih terkesan dipaksakan dan belum siap pakai.

Aplikasi *e-office* sendiri sudah di laksanakan sepenuhnya sejak tahun 2018, tentunya hal ini harus menjadi evaluasi yang harus segera di benahi oleh Organisator yang bertanggung jawab penuh dalam hal mengatur dan mempersiapkan *e-office* agar tidak ada lagi administrasi yang masih menggunakan cara manual dan penggunaan kertas dalam pelaksanaannya.

KESIMPULAN

1. Masih seringnya penggunaan kertas dalam hal administrasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, yang mana seharusnya dengan adanya *e-office* penggunaan kertas dapat diminimalisir penggunaannya.
2. Hambatan implementasi Peraturan Gubernur Riau no.56 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aplikasi Perkantoran secara Elektronik (*E-Office*) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau diantaranya adalah masih terbiasanya pegawai dengan budaya kerja secara manual, contohnya ialah pegawai hanya mau mengakses aplikasi *e-office* ketika pegawai hanya berada dikantor saja, padahal dengan adanya *e-office* ini seharusnya pegawai dapat mengaksesnya dimana saja dan kapan saja melalui *smartphone* yang dimiliki oleh pegawai itu sendiri.
3. Selanjutnya kendala yang sedang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau ialah masih belum siapnya tanda tangan elektronik kepala dinas baru yang mana hal tersebut menyebabkan proses administrasi dalam hal surat keluar harus dilaksanakan secara manual, tidak dapat diakses

melalui *e-office*.

4. Dan juga belum ter-backup nya secara menyeluruh administrasi perkantoran yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau ke dalam aplikasi *e-office* menyebabkan pelaksanaan *e-office* tidak berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., dan Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Abidin, Said Zainal, 2004, *Kebijakan Publik*, Jakarta Pancar Siwah
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cresweel W John. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ikbar Yanuar, (2012). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung:PT Refika Aditama.
- Indrajit.2004. *Electornic Government. Strategi Pembagunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi*, Yogyakarta:ANDI. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Kadji, Yulianto.(2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press
- Muslihudin, M., & Oktafianto. (2016). *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*.
- Nugroho, Riant. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*.
- Pebri Yanasari. 2019. *Implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penanganan Pasung di Kab. Kulonprogo* Yogyakarta:Skripsi
- Prayudha & Holidin. (2012). Penerapan E-Office dalam Hubungan antara Front Office dan Back Office di PT Kereta Api Indonesia (PERSERO). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* , 71-78.
- Rahmah & Meylia. (2015). *Efektivitas Kerja Pegawai dalam Menerapkan EOffice untuk Mendukung E-Government dalam Kegiatan*
- Siti nadaria. 2020. *Implementasi E-Office pada dinas tenagakerja Dan Transmigrasi provinsi riau: Skripsi*
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik.2015.*Dasar Metodologi Penelitian*.Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiyono, M., & Yasin, F. (2016). Pemanfaatan Paperless Office System dalam E-Government Studi Kasus di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Jurnal Teknologi Informasi* , 8-9.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edwards III*. Jakarta: Lukman Offset.